

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konflik internal yang terjadi pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) bukan pertama kalinya, tetapi pernah terjadi pada masa pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 saat pemilihan ketua umum Partai GOLKAR periode 2004 - 2009, musyawarah nasional (munas) yang dilakukan GOLKAR terbukti empat kali memunculkan partai baru, yaitu Wiranto dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Prabowo Subianto dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sutiyoso dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Surya Paloh dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada pemilihan ketua umum periode 2009 - 2014.

Konflik internal partai Golongan Karya (GOLKAR) yang berlangsung hingga saat ini berawal dari perbedaan dukungan pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Aburizal Bakrie yang memilih bergabung dengan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa membuat kecewa para kader GOLKAR di Provinsi maupun daerah.

GOLKAR sebagai Partai Politik yang menempati urutan kedua dalam Pemilihan Legislatif 2014 (setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) seharusnya GOLKAR mengajukan Calon Presiden ataupun Wakil Presiden sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), tetapi pada kenyataannya Aburizal Bakrie memilih berpihak kepada pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Hatta.

Konflik partai GOLKAR pada saat Pemilihan Presiden 2014 dipicu oleh masalah bergabungnya Aburizal Bakrie pada pihak Prabowo - Hatta yang membuat kecewa banyak kader GOLKAR, juga masalah kader “Partai Beringin” di daerah banyak yang mendukung pasangan Jokowi - Jusuf Kalla. Hal tersebut dikarenakan Muhammad Jusuf Kalla yang notabene adalah kader senior dari Partai GOLKAR dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Sebagai senior Partai, Jusuf Kalla mempunyai banyak pengalaman di pemerintahan dan juga mempunyai pengaruh besar terhadap simpatisan dan kader GOLKAR di Provinsi dan daerah.

Internal Partai GOLKAR terpecah karena perbedaan pendapat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Bila sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) Partai GOLKAR sesuai Munas Riau tahun 2009, seharusnya Munas dilaksanakan pada Januari 2015. Akan tetapi, Aburizal Bakrie dan pendukungnya menginginkan penyelenggaraan Munas di percepat, dan Aburizal Bakrie menyelenggarakan Munas di Bali sejak 30 November hingga 2 Desember 2014.

Adapun kubu Agung Laksono yang menolak percepatan Munas meminta agar Munas tetap diselenggarakan pada Januari 2015. Mereka pun membentuk Presidium Penyelamat Partai GOLKAR dan mengadakan Munas Tandingan. Setelah kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono melaksanakan Munas dan menetapkan masing-masing Ketua Umum, kedua kubu mengajukan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM ( Menkum HAM ).

Seperti yang dikutip dari berita online (<https://www.selasar.com/politik/penyebab-konflik-GOLKAR> di akses pada 6 Juni 2015 pukul 20.30 WIB ) Belakangan muncul istilah Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Tandingan di dalam tubuh Partai GOLKAR. Tuduhan itu ditujukan terhadap Munas yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada tanggal 6-8 Desember 2014, termasuk keputusan-keputusannya. Pasalnya, pada tanggal 30 November sampai 2 Desember 2014, juga berlangsung Munas di Bali. Dua struktur kepengurusanpun sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM guna diverifikasi dan dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah menurut hukum positif yang berlaku.

Struktur Kepengurusan yang diajukan oleh masing – masing kubu ke Menteri Hukum dan HAM menghasilkan keputusan bahwa struktur kepengurusan yang diakui dan dianggap sah adalah struktur kepengurusan Partai GOLKAR kubu Agung Laksono.

Menanggapi keputusan Menkum HAM, Kubu Aburizal Bakrie menganggap adanya intervensi pemerintah atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan struktur kepengurusan kubu Agung Laksono. Karena kubu Aburizal Bakrie masih menggugat keputusan Mahkamah Partai ke Pengadilan dan belum ada jawaban atas gugatan tersebut. Kubu Aburizal Bakrie menganggap bahwa pemerintah sengaja mengarahkan dukungan partai

GOLKAR Kubu Agung Laksono untuk mendukung pemerintahan dan tidak lagi berada pada Koalisi Merah Putih (KMP).

Seperti yang dikutip dari berita online [jpnn.com](http://www.jpnn.com) (<http://www.jpnn.com/read/2015/03/16/292715/Harusnya-Kubu-Ical-tahu-Yasonna-Hanya-Pelaksana-UU> di akses pada 05 April 2015 pukul 20.30 WIB) Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui kepengurusan GOLKAR kubu Agung Laksono menuai kecaman dari pihak Aburizal Bakrie. Kubu Ical -sapaan Aburizal- bahkan menuding Yasonna telah merecoki urusan internal GOLKAR. Namun, anak buah Agung di GOLKAR, Agun Gunanjar Sudarsa menilai kubu Ical justru tak tahu undang-undang sehingga menganggap Yasonna melakukan intervensi. Agun mengatakan, Yasonna selaku menkumham hanya melaksanakan undang-undang. "Mereka (kubu Ical, red) lupa kalau menkumham hanya melaksanakan UU saja. Kami juga menyayangkan langkah menkumham ini dikatakan intervensi, bahkan disebut begal demokrasi," kata Agun kepada JPNN, Senin (16/3).

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 pasal 32 dan 33 tentang partai politik sudah diatur dengan jelas, proses penyelesaian konflik pada internal Partai GOLKAR sudah sampai pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mencabut Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham yang mengakui struktur kepengurusan Agung Laksono.

Saat ini, konflik internal partai GOLKAR belum dapat diselesaikan. Bahkan konflik internal ini berimbas pada kepengurusan partai GOLKAR di Provinsi dan daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Perpecahan yang terjadi pada kepengurusan Partai GOLKAR di Provinsi Lampung yaitu antara M. Alzier Dianis Thabranie dari kubu Aburizal Bakrie dan anaknya Heru Sambodo dari kubu Agung Laksono.

Seperti yang dikutip dari media online [Republika.com](http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/03/17/nlcfqz-konflik-GOLKAR-anak-kudeta-posisi-bapak) (<http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/03/17/nlcfqz-konflik-GOLKAR-anak-kudeta-posisi-bapak> di akses pada tanggal 04 April 2015, Pukul 9:42 WIB) Politik tak mengenal istilah kawan dan lawan. Yang ada hanyalah kepentingan. Kisruh di tubuh Partai GOLKAR antara kubu Ketua Umum DPP hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, dengan Ketua Umum DPP hasil Munas Ancol, Agung Laksono, turut berdampak kepada perseteruan Heru Sambodo dengan ayahnya, Alzier Dianis Thabranie. Heru merupakan Ketua Fraksi Partai GOLKAR di DPRD Kota Bandar Lampung. Sejak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat yang mengesahkan GOLKAR pimpinan Agung Laksono, Heru terpaksa meninggalkan pilihan politik bapaknya yang berkiblat kepada kubu Ical.

Konflik kepengurusan Partai GOLKAR di Lampung ini terjadi karena perbedaan dukungan pada pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Dimana Alzier mendukung kubu Aburizal Bakrie dan menghadiri Munas di Bali. Sedangkan anaknya, Heru Sambodo mendukung Agung Laksono dan menghadiri Munas Jakarta. Perbedaan dukungan tersebut berujung pada pemecatan Heru Sambodo sebagai Ketua DPD II Partai GOLKAR Bandar Lampung oleh ayahnya Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPD I Partai GOLKAR Lampung.

Seperti yang dikutip dari media online Radar Lampung (diakses dari <http://reg.gb-forex.com/read/politika/77274-alzier-cabut-kta-dan-paw-heru-barlian> pada tanggal 26 Februari 2015 pukul 14.30 WIB), Kisruh di tubuh Partai GOLKAR (PG) Lampung antara M.W. Heru Sambodo dan M. Alzier Dianis Tabranie meruncing. Hasil rapat pleno diperluas yang digelar di aula DPD I Partai GOLKAR Lampung kemarin memutuskan mencabut kartu tanda anggota (KTA) dan mengusulkan pergantian antarwaktu (PAW) Heru Sambodo dan Barlian Mansyur.

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua DPD I PG Lampung versi Munas Bali M. Alzier. Alasan pencabutan KTA Heru dan Barlian, kata Alzier, karena keduanya sudah melanggar AD/ART partai berlambang pohon beringin ini. “Heru Sambodo dan Barlian Mansyur kita cabut KTA-nya dan akan kita PAW dari anggota DPRD Provinsi Lampung. Kesalahan Heru yakni karena sudah menghadiri Munas Ancol dan mengaku sebagai Plt ketua DPD I PG Lampung. Sedangkan Barlian Mansyur dicabut KTA

dan akan di PAW karena memimpin Musdalub tandingan beberapa waktu lalu,” ungkap Alzier, kemarin.

Konflik DPP GOLKAR yang berdampak pada konflik kepengurusan partai GOLKAR di Provinsi Lampung menarik perhatian penulis. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Sikap Politik Elite Partai Golongan Karya Terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya (studi pada DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Lampung).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Sikap Politik Elite Partai Golongan Karya Terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya ( Studi pada DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Lampung )?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sikap Politik Elite Partai Golongan Karya Terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya (Studi pada DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Lampung).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini memberikan sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian sikap politik para elite partai.
2. Memberikan wawasan pengetahuan agar dapat menyikapi konflik internal dalam organisasi kepartaian
3. Menjadi bahan pijakan penelitian selanjutnya

### **b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan gambaran bagaimana konflik yang terjadi di Internal Partai GOLKAR khususnya di DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung
2. Memberi masukan untuk penelitian – penelitian lanjut, khususnya penelitian terapan yang berkaitan dengan permasalahan internal partai politik
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi elite partai politik dalam menyikapi konflik internal partai politik